

Pemerintahan Desa Dan Masalah Keuangan

Buku yang berjudul "Pemerintahan Desa dan Kualitas Pelayanan Publik" sebagai bagian dari penelitian yang dilaksanakan tahun 2016. Buku ini terselesaikan tentu tidak hanya karena penulis telah berusaha maksimal akan tetapi karena bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Buku ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kajian ilmu administrasi publik dan lainnya sehingga dapat menjadi bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Di dalam buku ini mengkaji tentang pemerintahan desa dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Penulisan buku ini sebagai sumbangan bagi pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan (Petanglong) merepresentasikan wilayah pesisir di Pulau Jawa yang roda perekonomiannya bergerak sangat dinamis. Dinamika ini tidak saja karena kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, namun juga upaya mereka untuk terus mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut selama ini. Buku ini merupakan potret aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat "Petanglong" yang dikupas dan dikaitkan dengan kearifan lokal. Buletin 3 Bulanan DPMPD Prov. Kaltim, yang dipublish secara online untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan, kegiatan, dan hal hal lain mengenai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur

Keuangan desa harus dibangun dengan baik dalam rangka menyejahterakan seluruh masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakefisienan penggunaan dana desa, yang dapat berakibat pada stagnannya pembangunan desa di segala sisi. Dengan demikian, pembekalan pengetahuan mengenai keuangan desa selalu diperlukan oleh semua kepala desa.

ISET 2019

I Sogni

Gampong dalam Struktur Pemerintahan Aceh

Membangun Keuangan Desa

KABAR DESAKU Volume Pertama Tahun 2020

Commentary on the Indonesian law on local government with reference to adat law of Sumatera Selatan people.

Dalam upaya mewujudkan kemajuan bagi masyarakat perdesaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa cara untuk pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional karena melihat kondisi wilayah di Indonesia yang sebagian besar didominasi oleh kawasan perdesaan. Program-program yang dilakukan meliputi penguatan kapasitas aparat pemerintahan desa, peningkatan penguatan kelembagaan, pelatihan bagi masyarakat, pemberdayaan adat, sosial dan budaya, penggunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna hingga penguatan usaha ekonomi masyarakat Indonesia (Bappenas, 2009). Harapan ke depan, kawasan perdesaan mampu maju dan mandiri mengembangkan desa, seperti pepatah yang mengatakan bahwa dari masyarakat untuk masyarakat. Artinya bahwa ketika masyarakat sudah mampu berdaya dan mampu mengembangkan segala potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam maka Indonesia ke depan akan menjadi negara yang berdaya mampu bersaing dengan negara-negara maju lain. Salah satu upaya yang ditekankan dalam buku ini untuk memajukan perdesaan adalah membangun ekonomi di kawasan perdesaan. Ekonomi perdesaan menjadi salah satu aspek yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi basis kekuatan desa. Apalagi dengan melihat penduduk di Indonesia yang tinggal di daerah perdesaan. Aspek ekonomi perdesaan didorong agar mampu tumbuh menjadi salah satu kekuatan desa dan dapat memberikan kebermanfaatn bagi masyarakat desa.

Desa mulai hangat diperbincangkan Sejak tahun 2015 pada saat pertama kali pemerintah pusat mengucurkan anggaran ke desa, dan hal itu pula yang menjadikan desa menjadi sexy untuk di bahas. Hal ini merupakan salah satu langkah dan strategi utama pemerintah pusat untuk menyetarakan pembangunan di seluruh Indonesia. Dana Desa pertama kali di kucurkan oleh pemerintah pusat sebesar 20,76 Triliun ditahun 2015 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nehara (APBN) dan setiap tahunnya meningkat pesat. Namun dibalik besarnya anggaran yang dikucurkan tentunya menimbulkan polemik polemik dan ada gejala gejala patologis pada pemerintah desa yang harus diungkap. Buku ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian sebelumnya dan juga sebagai pertanggungjawaban sebagai insan akademik. Segala upaya penulis curahkan untuk penyelesaian buku ini dan merupakan suatu proses yang banyak menemukan kendala.

Namun, berkat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik

Buku ini ingin menawarkan konsep pemerintahan gampong yang pernah berlaku pada masa lalu. Dengan berbagai perkembangan dunia, apa yang dimiliki pada lalu perlu dimodifikasi dengan masa kini. Modal ini akan memudahkan kita membangun bagi masa depan.

PROSIDING TEMU ILMIAH NASIONAL BALITBANG TAHUN 2019 "PERCEPATAN PENGEMBANGAN DESA MANDIRI"

Prosiding Diseminasi Hasil Penelitian Dosen 2022 "Pariwisata Dalam Multi-Perspektif"

Mimpi-mimpi Seorang Ibu

BUKU KERJA SISTEM KEUANGAN DESA

BUM DESA SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI BARU (Sebuah Gagasan Untuk Desa di Indonesia)

Kabupaten Madiun membangun desa dan keluarga desa

Judul : Pengabdian Tanpa Batas Di Negeri Itawaka Penulis : Andjela Ritawaemahu, Jilly Tutuboy, Peter Aloys Yoll Kelanit, Inry natalia Tilukay, Gerardus Kadung, Frans solehuwey, Roberto Figin Solissa, Alnes Jermias, Kristina, Novalia Timisela, Desiriani Victoria Parayo, Falerien Jaolath, Dace Oratmangun, Paldo Wattimena, Diana Prilly priscillya renjaan, Dickyson Siahaya, Elsa Pattipeilohy, Joan, Shannon Matulesy, Rosita Tasane, Delila Delsiya Hukunala, Ursula sarbunan, Yulen Melaira, Sonia Leinussa, Nandia fidella pattinasarany, Enjel Anthonia Renyaan, Barnabas Pratama Lakesubun Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 268 Halaman No ISBN : 978-623-5314-66-2 Sinopsis Buku Menorehkan jejak pengabdian sebagai Mahasiswa pada akhir teori merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang belajar pada Universitas Pattimura Ambon melalui kegiatan Kuliah kerja Nyata. Buku ini mengisahkan tentang jejak pengabdian yang dilaksanakan dalam Kegiatan Kuliah kerja nyata mahasiswa KKN Unpatti Angkatan XLVIII Gelombang II Tahun akademik 2021/2022 yang ditempatkan di Negeri Itawaka sebanyak 25 orang mahasiswa. Dalam buku ini memuat 25 bab yang diawali dengan tulisan tentang sejarah Negeri Itawaka yang terdapat di Pulau Saparua. Mahasiswa menulisa tentang pengabdian mereka dalam beragam kegiatan yang dilaksanakan selama 2 bulan di Itawaka antara lain pendataan penduduk negeri, penataan kembali kawasan wisata Air Potang – Potang, perlindungan lingkungan hidup, pembaharuan denah negeri Itawaka, pengaruh gadget terhadap kehidupan anak sekolah di negeri hingga kisah dan sejarah Air Potang – Potang yang bersumber dari cerita warga dan aparat pemerintah Negeri yang digadang – gadang akan menjadi obyek wisata yang dapat mendatangkan Incone bagi warga negeri Itawaka. Para penulis adalah mahasiswa KKN Unpatti yang mengabdikan selama dua bulan di Negeri Ihamahu yang dikemas dalam 25 bab book chapter yang dapat dibaca oleh mahasiswa, dosen, praktisi desa/negeri ataupun stakeholder lainnya yang peduli terhadap kerja – kerja mahasiswa bersama masyarakat. Semoga buku ini dapat menginspirasi mahasiswa lainnya di kampus manapun di tanah air. Karya tulis ini merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan saat menempuh pendidikan magister. Namun dapat dikatakan isi dari buku ini telah mengalami banyak perubahan sehubungan dengan perkembangan hukum tentang pemerintahan Gampong di Aceh. Buku ini disusun dalam 7 (tujuh) bab yaitu bab 1 (satu) pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian ini dilakukan dan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pada bab 2 (dua) penulis fokus pada pembahasan pembagian kekuasaan di Indonesia. Bab 3 (tiga) tentang otonomi daerah dimulai dengan pembahasan sejarah otonomi daerah, asas-asas dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan kewenangan daerah di Indonesia dalam sistem desentralisasi. Pada bab 4 (empat), buku ini memaparkan masalah pemerintahan gampong atau desa dimana dimulai dengan penjelasan definisi pemerintahan desa, sejarah pemerintahan desa, kewenangan pemerintah desa, dan pengaturan keuangan pemerintah desa. Pada bab 5 (lima), penulis mengambil satu kasus pengaturan pemerintah gampong atau desa di Kota Lhokseumawe. Studi kasus tersebut mengungkap kewenangan pemerintah gampong, proses pemilihan kepada desa, struktur pemerintahan gampong, dan pengaturan keuangan pemerintah gampong pada gampong-gampong yang ada di Kota Lhokseumawe. Pada bab 6 (enam) yang merupakan inti kajian dari buku ini, penulis mengungkap masalah keberadaan gampong sebagai satuan pemerintahan otonom menurut undang-undang nomor 11 tahun 2006 dan kendala yang dihadapi dalam penerapan undang-undang tersebut pada pemerintahan gampong di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe yang menjadi case study dalam penelitian ini. Bab 7 berisi kesimpulan dan saran yang penulis temukan dalam penelitian ini.

Buku ini sebagai sebuah sumbangan pemikiran untuk pembangunan daerah sehingga mempunyai kebermanfaatan untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya. tujuan dari buku ini adalah dapat memberikan solusi dan terobosan baru dalam konteks "Daerah membangun" sebagai optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. keberhasilan membangun daerah tidak terlepas kaitannya dengan kinerja pemerintah daerah. maka dengan membaca buku ini juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam membangun dan memngembangkan daerahnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditentukan masing-masing daerah. buku ini, tidak hanya bersumber dari 1 (satu) kajian ilmu tetapi terkait dengan berbagai ilmu yang mendukung "Daerah membangun" meliputi tentang kebijakan pariwisata, kebijakan pendidikan, UMKM, BUMDes dana desa, komunikasi, pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan manajemen. Maka, diharapkan dengan adanya berbagai kajian ilmu ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan kalangan publik

CELL 2019

Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Teori Dan Aplikasi

BUNGA RAMPAL AKUNTANSI PUBLIK

Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya

Suka Cita Mengabdikan Di Perbatasan

Revisi RPJMA untuk Rasionalisasi Target Pencapaian target adalah variabel terpenting dalam pembangunan. Penetapan target-target ini, sebagaimana termaktub dalam struktur dokumen perencanaan mulai dari RPJP, RPJMA, hingga Rencana Kerja (Renja), adalah proyeksi keberhasilan pembangunan yang harus diupayakan tercapai oleh SKPA sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sebagai proyeksi yang inheren dalam proses perencanaan pembangunan, maka tentu target-target pembangunan ini ditetapkan sebagai gambaran ideal. Ia menjadi ideal untuk dicapai dan diwujudkan untuk memastikan bahwa pembangunan berhasil membawa perubahan atau kemajuan ke arah yang lebih baik. Namun tentu dinamika pembangunan pada kenyataannya sering membawa implikasi perlunya langkah-langkah penyesuaian terhadap target-target capaian ini agar lebih achievable. Inilah dasar pikir perlunya dilakukan revisi terhadap target-target pembangunan Aceh sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (2012-2017) dan yang tertera dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2013. Ini adalah proses yang normal dan menjadi bagian dari evaluasi tahunan terhadap pencapaian target RPJMA. Ketika dinilai tidak mencapai target, maka perlu dievaluasi untuk dikaji ulang dan direvisi dengan target dan angka-angka yang lebih realistis tentu dengan melihat dan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang kita miliki. Revisi RPJMA Aceh (2012-2017) di sisi lain sesungguhnya juga tidak dapat dipisahkan dari transisi pemerintahan di tingkat nasional yang kemudian melahirkan program atau kebijakan pembangunan baru yang menuntut penyesuaian di tingkat daerah-daerah. Jika kita bicara dasar hukum, maka langkah revisi ini sudah sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pada tahap selanjutnya hasil revisi akan

disepakati bersama-sama antara eksekutif dan legislatif untuk untuk kemudian ditetapkan dengan qanun.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di setiap daerah di Indonesia. Desentralisasi ini memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan desa merupakan salah satu yang menjadi unsur dari kelembagaan pemerintah Indonesia. Desa juga merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan daerah maupun pembangunan nasional. Terkait dengan pemahaman desa, inilah yang menjadi suatu tatanan bahwa Pemerintah Daerah berhak dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, dalam tatanannya Pemerintah Desa pun seharusnya perlu dikembangkan pula agar dapat menjadi desa mandiri, karena desa merupakan salah satu pondasi kuat dalam pemerintahan. Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengembangan Sistem Keuangan Desa merupakan satu bagian dari langkah yang diambil BPKP untuk berperan dalam rangka Pengawasan Keuangan Desa. Pemanfaatan aplikasi ini telah dilakukan piloting di Daerah Mamasa salah satu kabupaten Mamasa yang dari segi sarana prasarana masih belum memadai. Hasil dari piloting tersebut ternyata cukup berhasil, diindikasikan dengan penguasaan dari para perangkat desa atas pengoperasian hingga menghasilkan laporan APB Desa maupun dokumen dokumen lain yang dibutuhkan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa. Modul ini disusun untuk membekali para peserta diklat agar dapat memiliki gambaran mengenai aplikasi Siskeudes serta mempraktikkan penggunaan Siskeudes dalam satu siklus transaksi keuangan yang dapat terjadi dalam suatu lingkup pemerintahan desa. Hal-hal yang perlu diketahui untuk melaksanakan pengimplementasian Siskeudes dalam kegiatan sehari-hari pengelolaan keuangan di desa berusaha dicakup dalam modul ini, namun peserta diklat harus memperkaya pengetahuannya dengan berbagai variasi transaksi keuangan desa di wilayahnya.

Antara Kita & Upaya Perbaikan Kondisi Bangsa PENULIS: Sastra Wiguna Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-294-006-2 Terbit : Juli 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Dewasa ini, banyak masyarakat Indonesia hanya disibukkan dengan debat kusir di sosial media dan menciptakan kegaduhan-kegaduhan yang unfaedah. Seakan lupa, bahwa Negaranya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Negara ini membutuhkan banyak sekali dukungan dan sumbangan peran ataupun gagasan dari rakyatnya. Karena memperbaiki kondisi bangsa, sungguh tidaklah mudah. Memperbaiki kondisi bangsa bukanlah hanya tanggung jawab Negara saja, melainkan tanggung jawab kita semua. Banyak hal bisa dilakukan, yang dimulai dari diri sendiri dan dari hal-hal terkecil di lingkungan sekitar. Sebagaimana Bung Hatta pernah berkata: "Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa." Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai bagian dari tindakan nyata penulis dalam menyumbangkan gagasan sederhana melalui tulisan. Tulisan yang dikumpulkan dalam buku ini sebagian besar menjelaskan opini penulis dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia dari berbagai aspek kehidupan. Buku ini berisi ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan bangsa ini sebagai sebuah "perumahan" yang membuat betah bagi kehidupan bersama, sebagai bangsa dan Negara. Bukan Indonesia yang tercabik-cabik oleh benturan kepentingan atas nama golongan, agama, suku, ataupun latar belakang sejarah. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Praktikum Akuntansi Lembaga Instansi Pemerintah SMK/MAK Kelas XI

Pemerintahan desa/marga berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Kabupaten Madiun membangun desa dan keluarga desa

Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah SMK/MAK Kelas XII

suatu telaah administrasi negara

Kata siapa mengabdikan di perbatasan atau daerah pedalaman itu 'akan menderita'? atau terasa 'terisolasi'? Ternyata ditengah keterbatasan sarana dan prasarana yang ada, kami sangat menikmati mengabdikan di daerah ini, ada kebahagiaan tersendiri dapat bercengkrama dan saling belajar dengan masyarakat setempat yang berasal dari berbagai tingkatan sosial. Ditambah lagi dengan sikap masyarakat setempat yang menerima hasil kerjasama kami dan diakhiri dengan pemandangan pelukan, isak-tangis seolah tak rela berpisah dan melepas kepergian kami untuk kembali ke Jakarta ternyata telah membekaskan memori yang indah, melupakan segala permasalahan, perselisihan dan rintangan yang kami hadapi. Rasa lelah, letih, kulit menghitam karena terpapar matahari yang sangat terik, digigit binatang Agas yang tak terlihat wujudnya namun sangat gatal melebihi gigitan nyamuk dan membekaskan banyak luka seperti cacar air, belum lagi ketiadaan sinyal handphone yang sudah dianggap sebagai kebutuhan primer sehingga untuk dapat menangkap sinyal satu batangpun handphone kami letakkan di tempat-tempat yang 'strategis' seperti digantung di dapur, diletakkan disudut teras, berjalan hingga ratusan meter di perempatan jalan atau berdiri berlama-lama di bawah pohon walaupun tiba-tiba sinyal menghilang jika bergeser seedeiiiiit saja, aliran listrik yang hanya 6 jam nyalanya, air bersih untuk mandi, cuci, kakus harus dibeli itupun tidak sebening di Jawa... semua kesulitan itu sirna ketika terselip banyak pengalaman lucu nan berkesan. Belajar hidup prihatin menghadapi keterbatasan yang ada merupakan pengalaman sangat berharga tak terlupakan yang pada akhirnya telah membuat kami 'ketagihan' untuk tetap peduli pada sesama dengan melakukan pengabdian masyarakat di berbagai tempat dan kegiatan di negeri yang kita cintai ini. Berbagai cerita indah dalam BUKU KECIL INI hanyalah sepenggal cerita dari episode lengkap kami selama melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (K2N) UI tahun 2014 dan dilanjutkan dengan program Community Engagement Grants (CEGs) UI tahun 2015. Informasi yang kami sampaikan berisi ringkasan semua kegiatan yang dikemas dalam bahasa yang ringan disertai dengan kata penyemangat dan lirik lagu-lagu yang diubah sesuai dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Sedangkan profil masing-masing desa kami sajikan dalam bahasa yang lebih

formal, tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada publik yang selama ini belum terekspos agar berbagai pihak dapat mengetahui potensi serta permasalahan yang ada di daerah tersebut. Apa yang sudah dirintis kami tentu saja belum membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat. Diperlukan program yang berkelanjutan dan terarah agar masyarakat dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah lain yang sudah lebih dahulu berkembang, mandiri dan maju.

Buku ini merupakan sebuah pengantar awal yang masih memerlukan banyak penyempurnaan dari berbagai hal tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk itu, berbagai saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan guna penyempurnaan isi buku ini. Pembahasan dalam buku ini adalah: Bab 1 Kedudukan Daerah/Desa dalam NKRI Bab 2 Konsep Otonomi Daerah Bab 3 Konsep Otonomi Desa Bab 4 Wewenang Pemerintah Daerah Bab 5 Urusan Pemerintahan Bab 6 Organisasi Pemerintahan Daerah Bab 7 Organisasi Pemerintahan Desa Bab 8 Peraturan Daerah Bab 9 Peraturan Desa Bab 10 Keuangan Daerah Bab 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Membangun Keuangan Desa Bumi Aksara

Buku ini disusun dengan memperhatikan Struktur Kurikulum SMK berdasarkan Kurikulum 2013 edisi revisi spektrum PMK 2018 dan jangkauan materi sesuai dengan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk kelompok C3 Kompetensi Keahlian. Buku ini diharapkan memiliki presisi yang baik dalam pembelajaran dan menekankan pada pembentukan aspek penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Materi pembelajaran disajikan secara praktis, disertai soal-soal berupa tugas mandiri, tugas kelompok, uji kompetensi, dan penilaian akhir semester gasal dan genap. Buku ini disusun berdasarkan Permendikbud No 34 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan SMK/MAK, pada lampiran II tentang standar Isi, lampiran III tentang Standar Proses dan lampiran IV tentang Standar Penilaian. Acuan KI dan KD mengacu pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan No: 464/D.D5/Kr/2018 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar. Berdasarkan hasil telaah ilmiah, buku ini sangat sistematis, bermakna, mudah dipelajari, dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa dalam memperkaya dan mendalami materi. Pemakaian buku ini juga dapat menantang guru untuk berinovasi dalam pembelajaran sesuai konteks di kelas masing-masing.

ISU KONTEMPORER AKUNTANSI PUBLIK

KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA DI INDONESIA

Pemerintahan Desa Dan Kualitas Pelayanan Publik

Gampong dan Mitigasi Bencana Sosial

Pengabdian Tanpa Batas Di Negeri Itawaka

Peran dan kedudukan desa di masa Orde Baru banyak dinilai dan ditempatkan sebagai objek dari berbagai kepentingan, sehingga peran desa terasa termajinalkan dalam skema ketatanegaraan. Oleh karenanya, terbitnya UU tersebut dapat dianggap sebagai obat penenang sementara bagi beberapa kalangan atau kelompok-kelompok kepentingan yang secara politis menghendaki pembaharuan atau-pun perubahan peran dan fungsi Desa sejalan dengan realitas sosial dan kebutuhan yang ada dalam konteks era globalisasi dan neo liberalisasi. Meskipun payung hukum terhadap kebijakan tentang desa telah dikeluarkan dan diikuti serta diperjelas dengan berbagai aturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Perda yang masing-masing daerah, akan tetapi diskursus mengenai ideal type desa ke depan masih banyak diperbincangkan dan diperdebatkan oleh banyak pihak untuk mencari rumusan formasi yang tepat. Sound of Village Governance terus didengungkan pemerintah melalui berbagai cara dan media untuk memperoleh penguatan, pembenaran dan pengakuan terhadap proses rencana perubahan kedudukan dan fungsi desa di masa depan. Meskipun demikian, diskursus yang terjadi tidak sekedar memperkuat dan membenarkan apa yang telah menjadi kebijakan politik pemerintah, namun ada pula pandangan-pandangan kritis yang acap kali dimunculkan sebagai bagian dari berjalannya demokrasi melalui proses komunikasi-dialogis.

The 1st International Conference On Culture, Education, Linguistics, and Literature (CELL) Universitas Jenderal Soedirman (Jenderal Soedirman University). The rapid development of information and communication technology on information continuously encourages the global society known as Industrial Revolution 4.0. It was first introduced by German Economist Schwab, in his book entitled "The Fourth Industrial Technology" in 2012. The complexity and interconnected sector in our daily life urge all stakeholders of the global society (government actors, academicians, and civil society) have the responsibility to work together. The conference invites delegates from across Indonesian and attended by more than 75 participants including academics, researchers, practitioners, and professionals across a wide range of industries.

Terdiri dari : UU Desa PP 43/2014, PP 60/2014 Beberapa Permendagri dan beberapa Permendes terkait Desa

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi sektor publik. Dari ketiga isu tersebut menjadi 22 sub judul yang menarik untuk dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah peristiwa penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop Akuntansi Publik "Posisi dan Teori Dasarnya" yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se Indonesia. Penyebutan kata "sektor" menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Sektor Publik. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sifat pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekuensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan pengendalian sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen.

Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa

EKONOMI DAN KEARIFAN LOKAL "PETANGLONG"

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua
Antara Kita & Upaya Perbaikan Kondisi Bangsa
Dana Desa Menuju Kedaulatan Gampong

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi buku ini disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terbaru, yakni UU RI No. 9 Tahun 2015 jo. UU RI No. 23 Tahun 2014. Selain itu, penyusunannya disesuaikan dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Kajian pokok buku ini, meliputi:

- 1. Pengantar Pemerintahan Daerah.*
- 2. Pembentukan Daerah, Kawasan Khusus dan Perbatasan.*
- 3. Pembagian Urusan Pemerintahan.*
- 4. Penyelenggaraan Pemerintahan.*
- 5. Sistem Pemilihan Kepala dan wakil Kepala Daerah.*
- 6. Kedudukan, tungsi, Tugas dan wewenang DPRD.*
- 7. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.*
- 8. Kepegawaian Daerah, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Sipil Daerah/Kab/Kota.*
- 9. Prinsip Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah.*
- 10. Perencanaan Pembangunan Daerah.*
- 11. Pembentukan Kawasan Perkotaan.*
- 12. Pemerintahan Desa.*
- 13. Kerja Sama Daerah dan Perselisihan.*
- 14. Sistem Inovasi Daerah (SIDa).*

Buku ini layak dijadikan referensi bagi pejabat negara, politisi partai, anggota dewan, akademisi, mahasiswa, dan semua warga negara. Tujuan diadakannya buku ini guna mematangkan wawasan kita dalam memahami Pemerintahan Daerah baik secara teori, hukum, dan Aplikasinya.

Temu Ilmiah Nasional Tahun 2019 dihadiri oleh beberapa kalangan akademisi dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, para praktisi maupun birokrasi dari Lembaga Litbang yang berasal dari berbagai provinsi, kabupaten dan kota yang akan membahas dan mendiskusikan situasi problematik yang dihadapi Desa dalam upaya mempercepat kemandiriannya guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan hasil penelitian maupun kajian berupa 94 paper dari 166 yang telah melalui proses seleksi dan review oleh para pakar yang dilanjutkan dengan editing, maka diharapkan dapat memberikan wawasan, masukan maupun best practice yang relevan berkaitan dengan percepatan pengembangan desa mandiri. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang telah berkenan membuka acara Temu Ilmiah Nasional Tahun 2019 dan Keynote Speaker, para Pembicara/Narasumber, Moderator, Reviewer, Editor dan para Peserta serta Pemakalah yang telah menyumbangkan pemikirannya melalui paper dalam prosiding ini. Disamping itu disampaikan terima kasih pula kepada Universitas Brawijaya Malang dan Program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang yang telah mendukung terselenggaranya acara Temu Ilmiah Nasional 2019.

Manfaat Dana Desa di Provinsi Aceh

Melihat fenomena pembangunan yang ada di Indonesia utamanya pembangunan desa sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana telah diamanahkan bahwa salah satu pembangunan desa adalah dengan lahirnya usaha-usaha yang dikelola secara profesional oleh desa tersebut. Usaha-usaha itulah yang nantinya akan bermuara pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Buku ini menjelaskan pembangunan pedesaan (konsep, tujuan, dan manfaat); Badan Usaha Milik Desa (kepemilikan, kinerja, dan penguatan kelembagaan); pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa; dan Sistem Akuntansi Badan Usaha Milik Desa. Buku ini adalah panduan terpercaya bagi para Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lurah dan perangkat kelurahan, camat, birokrat, kepala daerah dan legislatif, organisasi kemasyarakatan, dan kalangan praktisi lainnya yang ingin lebih memahami Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan kiprahnya di Indonesia.

Manfaat Dana Desa di Provinsi Aceh

Tabangun Aceh - Edisi 46

Proceedings of the 5th International Conference on Science, Education and Technology, ISET 2019, 29th June 2019, Semarang, Central Java, Indonesia

Mimbar

Rekonstruksi Pemerintahan Gampong

Buku ini ditulis sebagai media priaktisi BUM Desa akademisi para pakar di bidang pembangunan serta pengembangan Desa untuk menuangkan semua ide atau gagasan mereka, sehingga mampu menginspirasi pembaca (masyarakat luas dalam partisipasinya untuk membangun indonesia dari pinggir, salah satunya melalui revitalisasi dan optimalisas BUM Desa sebagai kekuatan baru di indonesia.

Puji syukur kepada Allah swt atas perkenanNya, Akuntansi Pemerintahan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik penulis. Buku ini memberikan gambaran tentang akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menerapkan akuntansi berbasis akrua. Buku ini membahas secara lengkap/ menyeluruh dan mencakup seluruh aspek dalam akuntansi pemerintahan berbasis akrua dan menggunakan pendekatan praktis, namun demikian buku ini disajikan secara sederhana, step by step mulai dari pemahaman dasar. Pada awal pembahasan diberikan pemahaman dasar akuntansi pemerintahan secara sederhana, dan pada bahasan selanjutnya diberikan pemahaman lengkap mengenai siklus akuntansi pemerintahan mulai dari analisis dan pencatatan transaksi, penjelasan tiap item/akun yang akan disajikan dalam laporan keuangan, hingga proses penyusunan laporan keuangan pemerintahan. Buku ini sangat tepat menjadi pegangan bagi para mahasiswa yang menempuh mata kuliah akuntansi pemerintahan I dan para staf pelaksana/pejabat pemerintah yang menangani secara teknis akuntansi pemerintah, atau para pembaca yang ingin belajar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Kami berharap, Buku yang telah disusun dengan mempertimbangkan aspek kemudahan untuk dipahami ini, menjadi materi yang bermanfaat bagi pembaca, terutama dalam meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

Semoga keseluruhan proses pembelajaran ini menjadi proses yang berkelanjutan untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Tak ada gading yang tak retak, tak ada karya yang sempurna, kecuali karya dari Yang Maha Berkarya. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca dan sesama pengajar sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas buku ini di masa yang akan datang. Setiap karya haruslah dipandang sebagai produk dinamis yang selalu punya peluang untuk ditingkatkan mutunya.

Buku ini telah disusun melalui kolaborasi penulis akademisi dan praktisi sektor publik. Kami berharap kehadiran buku ini dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, terutama untuk bidang akuntansi dan atau manajemen sektor publik. Buku ini tersusun dalam 10 bab yang secara sistematis menjelaskan tentang pengukuran kinerja secara teoretis maupun aplikasi, yaitu Performance Measurement/Pengukuran Kinerja, Kinerja dan Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas dan Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja, Indikator Kinerja Sektor Publik, Perencanaan dan Penganggaran, Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa, Impelementasi Pengendalian dalam Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Audit Kinerja, dan Evuasi Kinerja. Diseminasi Hasil Penelitian Dosen ini merupakan implementasi hasil kerja sama antar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Universitas di Provinsi Bali pada Jumat, 20 Mei 2022 yang berjalan dengan lancar dan dapat terlaksana dengan baik serta mendapat antusiasme yang tinggi dari para peserta. Para akademisi yakni dosen yang berkolaborasi antar stakeholders terkait telah banyak menghasilkan riset yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, namun masih banyak yang belum didiseminasikan dan dipublikasikan secara luas. Oleh karena itu, kerja sama yang di jalin antar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan beberapa Universitas di Provinsi Bali yang menjadi fasilitator untuk riset para akademisi perguruan tinggi untuk diakses oleh masyarakat atau stakeholders yang membutuhkan, sehingga masyarakat atau stakeholders dapat menjadikan hasil riset dosen sebagai sarana untuk melaksanakan strategi-strategi tertentu demi tujuan bersama. Atas dasar tersebut, Diseminasi Hasil Penelitian Dosen ini menjadi salah satu ajang bagi para akademisi untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam hasil penelitian, serta mengembangkan kerja sama yang berkelanjutan. Acara ini diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai bidang ilmu dari FISIP Universitas Jember dan Perguruan Tinggi di Bali dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Kami sangat berharap prosiding ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua khalayak. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah berupaya menyukseskan acara dan prosiding ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua usaha baik kita.

Perekonomian Gorontalo

GEJALA PATOLOGI BIROKRASI PEMERINTAH DESA

Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa

Proceedings of First International Conference on Culture, Education, Linguistics and Literature, CELL 2019, 5-6 August, Purwokerto, Central Java, Indonesia

Pengantar Pemerintahan Daerah

Buku ini memberikan potret perkembangan dan hambatan pembangunan di Gorontalo. Indikator yang digunakan adalah variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, keadaan kemiskinan, ketimpangan, masalah pengangguran, fiskal dan sumber daya manusia. Variabel-variabel ini digunakan selain datanya mudah didapatkan juga karena sudah menjadi alat pengukuran evaluasi makro yang umum digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Perekonomian Gorontalo : Perkembangan, Agenda Dan Tantangan Ke Depan ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Aku terdiam Memandangi batu putih yang telah hitam Rinduku semakin jauh bersikeras Sampai melebihi laparnya malam akan rembulan (Izzad Aminah, adik Luthfi Hakim) Langit membiru setelah tertutup awan gelap. Hujan berhenti dari keributannya yang mengganggu, menjadi rintik yang kecil saja.

Seketika Lutfi Hakim terbangun. Dia berdiri memandang keluar jendela, melihat matahari yang kembali bercerita di langit Kopenhagen, Denmark. Lutfi Hakim teringat mata tua Ibunya yang menangis ketika mengantarnya di Bandara Soekarno-Hatta. Ingatan itu selalu merapuhkan hatinya, meneteskan air matanya, dan menghilangkan tidurnya. Luthfi Hakim berasal dari sebuah desa bernama Kritig, Petanahan, Kebumen, Jawa Tengah. Karena beberapa alasan, dia mendapatkan kesempatan untuk melihat dunia, dari mulai Denmark di Eropa, sampai Lebanon di Timur Tengah. Namun, semua itu tidak lepas dari mimpi dan doa Ibunya, sebuah mimpi yang bercengkrama dalam waktu, hingga cinta, perjuangan, kebaktian, dan kesedihan silih berganti menjadi selimutnya, sampai pada akhirnya, dia menemukan cinta di sekian petualangannya. Bagaimana kehidupan Luthfi Hakim? Apakah cintanya akan saling berjumpa? Bagaimana bisa sebuah mimpi tidak hanya menjadi sekedar mimpi? Selamat membaca.

The proceedings of International Conference on Science, Education, and Technology 2019 are the compilation of articles in the internationally refereed conference dedicated to promote acceleration of scientific and technological innovation and the utilization of technology in assisting pedagogical process. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai hasil riset dengan tiga isu akuntansi publik yaitu isu akuntansi pemerintah daerah, isu organisasi publik (nirlaba), dan isu akuntansi bumdes. Dari ketiga isu tersebut menjadi 21 sub judul yang menarik untuk dibaca. Hadirnya buku ini diharapkan dapat menambah literatur bagi yang berminat mendalami dan meneliti ilmu akuntansi (sektor) publik. Sebuah peristiwa penting yang menjadi milestone perkembangan Akuntansi Publik terjadi di FEB UGM pada tanggal, 1 Desember 2018 yaitu perubahan nama dari Akuntansi Sektor Publik (ASP) menjadi Akuntansi Publik (AP) pada acara Workshop Akuntansi Publik "Posisi dan Teori Dasarnya" yang dihadiri oleh 200 peserta dari berbagai PTN/PTS se

Indonesia. Penyebutan kata “sektor” menempatkan akuntansi untuk organisasi nirlaba ini sebagai subordinat atau cabang dari akuntansi yang lebih besar, dalam hal ini adalah akuntansi untuk organisasi bisnis. Oleh karena itu penggunaan kata yang tepat adalah Akuntansi Publik (tanpa sector). Akuntansi Publik adalah akuntansi yang memiliki hulu sendiri yang terpisah dari hulu Akuntansi Bisnis. Beberapa argument yang mendukung diantaranya: adanya perbedaan latar belakang pembentukan organisasi, tujuan pendirian organisasi dan cara pencapaian tujuan organisasi, serta sumber dan sifat pendanaan organisasi. Perbedaan-perbedaan ini memberikan konsekuensi perbedaan yang signifikan di antara kedua dunia akuntansi tersebut pada aspek perencanaan dan penganggaran, sistem pelaporan keuangan (akuntansi keuangan), maupun akuntansi manajemen. Dengan di terbitkannya buku ini, kami penyunting mengucapkan banyak terima-kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam buku ini dan juga penerbit yang telah membantu proses penerbitan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pembelajaran, pengembangan, pemahaman, dan menjadi inspirasi untuk terbitnya buku-buku berikutnya.

Pemerintahan dan administrasi desa

KETERBUKAAN SISTEM INFORMASI

Rumah pajang Poncokusumo : contoh prukades dan bumdesma di kabupaten Malang

Pengantar Otonomi Daerah dan Desa